JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KOTA CILEGON

STRATEGY FOR IMPROVING THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) IN CILEGON CITY

Alwin Setiawan
Bappedalitbang Kota Cilegon, Jl. Buyut Arman No. 1 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon 42441
E-mail: alwinset2025@gmail.com

disubmit: 26 Mei 2025, direvisi: 12 Juni 2025, diterima: 19 Juni 2025

ABSTRAK

Kesenjangan capaian pembangunan manusia antarwilayah di Provinsi Banten menunjukkan perlunya strategi khusus bagi daerah seperti Kota Cilegon untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian IPM Kota Cilegon, mengevaluasi komponen penyusunnya, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi, serta merumuskan strategi peningkatan IPM berbasis analisis SWOT. Capaian IPM Kota Cilegon tahun 2024 sebesar 78,83 berada pada kategori “tinggi”, namun belum mencapai level “sangat tinggi” sebagaimana beberapa kota lain di provinsi ini. Analisis terhadap dimensi IPM menunjukkan bahwa standar hidup layak (pengeluaran per kapita) memiliki kontribusi tertinggi, disusul oleh kesehatan (umur harapan hidup), sementara dimensi pendidikan, khususnya harapan lama sekolah, masih menjadi tantangan utama. Faktor penghambat meliputi ketimpangan akses layanan dasar antarwilayah, rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kesehatan, serta minimnya sinergi lintas sektor. Melalui analisis SWOT, strategi WO (Weakness–Opportunities) dinilai paling relevan karena menekankan penguatan kapasitas lokal dan pemanfaatan peluang kemitraan eksternal. Dengan pendekatan yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis data, diharapkan peningkatan IPM Kota Cilegon dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata.

Kata kunci: IPM, pendidikan, kesehatan, strategi pembangunan, SWOT, Kota Cilegon.

ABSTRACT

The gap in human development achievements between regions in Banten Province indicates the need for special strategies for areas like Cilegon City to accelerate the improvement of the Human Development Index (HDI). This research aims to analyze the Human Development Index (HDI) achievement of Cilegon City, evaluate its constituent components, identify influencing factors, and formulate strategies for HDI improvement based on SWOT analysis. The HDI achievement of Cilegon City in 2024 is 78.83, categorized as "high," but it has not yet reached the "very high" level like some other cities in this province. Analysis of the HDI dimensions shows that the standard of living (per capita expenditure) has the highest contribution, followed by health (life expectancy), while the education dimension, particularly the expected years of schooling, remains the main challenge. The inhibiting factors include disparities in access to basic services between regions, the low quality of educators and healthcare providers, and minimal cross-sector synergy. Through SWOT analysis, the WO (Weakness–Opportunities) strategy is considered the most relevant because it emphasizes strengthening local capacity and utilizing external partnership opportunities. With an integrated, participatory, and data-driven approach, it is hoped that the improvement of Cilegon City's HDI can occur sustainably and equitably.

Alwin Setiawan (2025). Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 9(1), 86–110.
https://doi.org/10.56945/jkpd.v9i1.378

© Penulis | Penerbit: Bappeda Provinsi Banten
Lisensi: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

Keywords: HDI, education, health, development strategy, SWOT, Cilegon City.

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan secara luas sebagai indikator keberhasilan pembangunan, dengan mencakup tiga dimensi utama: umur harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. Kota Cilegon, sebagai kota industri yang sedang berkembang di Provinsi Banten, memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan IPM di tengah tekanan pertumbuhan penduduk, ketimpangan layanan dasar, dan dominasi sektor industri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) menunjukkan bahwa IPM Kota Cilegon pada tahun 2024 tercatat sebesar 78,83, dengan pertumbuhan tahunan 0,59 poin. Meskipun masuk dalam kategori "tinggi," angka ini masih tertinggal dibanding kota lain di Provinsi Banten seperti Kota Tangerang Selatan yang telah mencapai kategori "sangat tinggi." Sementara itu, komponen penyusun IPM masih menunjukkan disparitas: harapan lama sekolah hanya sebesar 13,23 tahun, dan rata-rata lama sekolah 10,39 tahun, yang mencerminkan masih rendahnya pencapaian sektor pendidikan secara merata. Selain itu, pengeluaran per kapita sebagai representasi standar hidup masyarakat baru mencapai Rp14,294 juta/tahun, yang belum optimal mencerminkan kualitas daya beli masyarakat industri.

Meskipun Kota Cilegon telah mengalami perkembangan administratif yang signifikan sejak dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986 sebagai Kota Administratif, kualitas pembangunan manusianya masih menunjukkan perlunya peningkatan. Seiring dengan perubahan status administratif hingga menjadi kota otonom dengan delapan kecamatan dan 43 kelurahan (BPS Kota Cilegon, 2024), pembangunan fisik wilayah mengalami pertumbuhan. Namun, capaian pembangunan manusia yang menyangkut pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak belum sepenuhnya optimal.

Penduduk Kota Cilegon pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 455,62 ribu jiwa, terdiri dari 230,79 ribu laki-laki dan 224,83 ribu perempuan, dengan persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) sebesar 68,67 persen (BPS Kota Cilegon, 2025). Angka ini menandakan bahwa Kota Cilegon berada dalam periode bonus demografi, yaitu kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Situasi ini dapat menjadi peluang strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik.

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

Namun demikian, dari total penduduk usia kerja yang berjumlah 335,68 ribu orang, hanya 204,18 ribu orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12,42 ribu orang masih tergolong pengangguran terbuka (BPS Kota Cilegon, 2025). Ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja belum optimal. Pengangguran yang relatif tinggi ini dapat menghambat pemanfaatan bonus demografi dan menjadi beban pembangunan jangka panjang jika tidak segera diatasi.

Menurut Rosana (2018), pembangunan adalah proses sadar dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengubah kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik, mencakup aspek fisik dan nonfisik, serta material dan spiritual. Oleh karena itu, indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi tolok ukur penting keberhasilan pembangunan daerah. Dengan potensi demografis yang dimiliki, peningkatan IPM Kota Cilegon menjadi suatu kebutuhan mendesak agar capaian pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Urgensi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Cilegon menjadi sangat penting mengingat bahwa tujuan akhir dari pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, manusia tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi juga harus menjadi subjek aktif yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan negara (Herdiansyah & Kurniati, 2020). Pembangunan yang berfokus pada manusia memberikan ruang bagi individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai, sehat, berpengetahuan, dan memiliki akses terhadap sumber daya untuk hidup secara layak (UNDP, 1990).

IPM menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Indeks ini mencakup tiga aspek penting, yaitu harapan hidup saat lahir sebagai indikator kesehatan, tingkat pendidikan yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup yang ditunjukkan melalui pengeluaran per kapita tahunan (Herdiansyah & Kurniati, 2020). Ketiga komponen ini mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan IPM di Kota Cilegon bukan hanya menjadi indikator statistik, tetapi juga mencerminkan pencapaian pembangunan yang berorientasi pada manusia secara utuh.

Dengan melihat pentingnya IPM sebagai cerminan kualitas hidup masyarakat, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Upaya ini sangat relevan dalam konteks Cilegon yang tengah berada pada fase bonus

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

demografi, di mana potensi sumber daya manusia sangat besar dan dapat menjadi modal utama untuk mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Komponen IPM dapat dilihat pada tabel 1. Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung dari tiga dimensi utama, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (diukur melalui harapan hidup saat lahir), pengetahuan (diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup layak (diukur dari pengeluaran per kapita).

Tabel 1
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Komponen IPM	Sat	Min	Max
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran Perkapita	Rupiah	1.007.436,-	26.572.352,-

Rentang minimal dan maksimal yang ditentukan untuk setiap indikator menjadi acuan normalisasi skor yang akan diolah menggunakan rata-rata geometrik. Dengan batas minimum dan maksimum seperti harapan hidup (20–85 tahun), harapan lama sekolah (0–18 tahun), serta pengeluaran per kapita (Rp1.007.436–Rp26.572.352), maka posisi capaian Kota Cilegon dalam rentang ini akan menentukan nilai IPM-nya. Jika nilai aktual Kota Cilegon masih jauh dari nilai maksimum, maka jelas IPM perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa hidup lebih sehat, berpendidikan tinggi, dan sejahtera secara ekonomi.

Urgensi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon memiliki relevansi strategis dengan Visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan tercapainya status negara maju melalui penguatan kualitas sumber daya manusia. IPM tidak hanya berfungsi sebagai indikator statistik, tetapi juga merepresentasikan kualitas hidup, daya saing, serta kapasitas suatu wilayah dalam memanfaatkan peluang bonus demografi. Dalam konteks tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pembangunan kesehatan di Kota Cilegon—sebagai salah satu dimensi utama IPM—serta merumuskan strategi yang efektif dan aplikatif dalam meningkatkan capaian IPM daerah secara menyeluruh. Penguatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat diharapkan mampu mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang unggul, inklusif, dan berdaya saing, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan sistem demokrasi, dan terwujudnya keadilan sosial (Bappenas, 2022). Dengan demikian, perumusan

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

kebijakan pembangunan manusia berbasis kesehatan menjadi elemen kunci dalam upaya percepatan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau objek yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut meliputi data IPM, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif untuk merumuskan strategi Peningkatan IPM Kota Cilegon dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman dengan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*)dan ancaman (*threats*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian IPM Kota Cilegon

Indeks Pembangunan Manusia Kota Cilegon pada tahun 2024 sebesar 78,83 meningkat 0,59 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 78,24 (BPS Cilegon, 2024).

Tabel 2
Indeks Pembangunan Manusia Kota Cilegon Tahun 2024

Indikator	Nilai
Umur Harapan Hidup (UHH)	75,03
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,23
Rerata Lama Sekolah (RLS)	10,39
Pengeluaran per kapita (juta rupiah)	14,294
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,83
Laju Pertumbuhan IPM	0,59

Sumber: BPS Cilegon (2024).

Pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan (BPS Cilegon, 2024).

Berdasarkan Tabel 2, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon pada tahun 2024 mencapai 78,83, meningkat sebesar 0,59 poin dari tahun sebelumnya. Nilai ini menempatkan Cilegon dalam kategori pembangunan manusia tinggi (IPM 70–79,99). Peningkatan IPM ini dipengaruhi oleh naiknya seluruh dimensi pembentuk IPM: Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

sebesar 13,23 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 10,39 tahun, dan pengeluaran per kapita sebesar 14,29 juta rupiah. Pertumbuhan IPM ini menunjukkan adanya perbaikan sinergis dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sejalan dengan pandangan (Todaro & Smith, 2020) yang menyebut bahwa peningkatan kualitas hidup dalam pembangunan manusia bersumber dari investasi berkelanjutan di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi.

Tren Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Cilegon dari tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami tren positif. Perbandingannya dengan capaian Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota lain disajikan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Capaian IPM Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota 2021-2024

Provinsi/Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
Banten	74,68	75,25	75,77	76,35
Pandeglang	69,02	69,7	70,28	70,88
Lebak	66,5	67,19	67,68	68,33
Tangerang	74,47	75,15	75,56	76,19
Kabupaten Serang	71,05	71,99	72,63	73,28
Kota Tangerang	80,08	80,44	80,98	81,53
Kota Cilegon	77,11	77,68	78,24	78,83
Kota Serang	75,53	76,01	76,43	76,9
Kota Tangerang Selatan	82,98	83,28	83,57	84,16
Indonesia	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS Cilegon (2024).

Data tabel 3 menyajikan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2021–2024 di Provinsi Banten beserta seluruh kabupaten/kota di dalamnya, dibandingkan dengan rata-rata nasional Indonesia. Secara umum, terjadi tren peningkatan IPM yang konsisten di semua wilayah, mencerminkan adanya kemajuan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Provinsi Banten sebagai agregat menunjukkan kenaikan dari 74,68 (2021) menjadi 76,35 (2024), meningkat sebesar 1,67 poin dalam empat tahun. Namun, disparitas pembangunan antarwilayah tetap nyata. Kota Tangerang Selatan tercatat sebagai daerah dengan IPM tertinggi (84,16 pada 2024), melampaui rata-rata nasional (75,02), sementara Kabupaten Lebak berada pada posisi terendah (68,33 pada 2024).

Secara khusus, Kota Cilegon menunjukkan perkembangan yang stabil dan cukup positif, meningkat dari 77,11 (2021) menjadi 78,83 (2024), dengan selisih 1,72 poin. Posisinya berada di atas rata-rata nasional dan provinsi, namun masih tertinggal dari kota-kota besar lain di Banten seperti Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Cilegon merupakan kota industri, peningkatan kualitas manusia tidak secepat kota metropolitan yang lebih maju dari sisi infrastruktur dan akses pelayanan dasar. Sebaliknya, kabupaten seperti Pandeglang dan Lebak terus tertinggal dengan IPM jauh di bawah rata-rata,

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

memperlihatkan adanya ketimpangan spasial dalam pembangunan manusia.

Menurut studi oleh Ramadanisa & Triwahyuningtyas (2022) ketimpangan IPM di wilayah-wilayah Indonesia seringkali dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lokal, ketersediaan infrastruktur dasar, serta distribusi anggaran pembangunan yang belum merata. Kota dengan sumber daya fiskal tinggi dan akses pendidikan serta kesehatan yang lebih baik cenderung mengalami percepatan peningkatan IPM. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Sutjipto, (2006) yang menyatakan bahwa peningkatan IPM sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, terutama dalam penguatan pendidikan menengah dan pelayanan kesehatan ibu-anak.

Oleh karena itu, strategi pengurangan kesenjangan IPM di Banten perlu diarahkan pada penguatan layanan dasar di daerah tertinggal, intervensi pembangunan berbasis data spasial, serta pendekatan kolaboratif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pendekatan tata kelola kolaboratif dapat mempercepat pencapaian target pembangunan manusia melalui integrasi program pusat-daerah dan partisipasi masyarakat.

Tabel 4 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon berdasarkan tiga dimensi utama penyusunnya, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak selama periode 2020–2024. Pada dimensi kesehatan, indikator Umur Harapan Hidup (UHH) mengalami peningkatan dari 74,23 tahun pada tahun 2020 menjadi 75,03 tahun pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta keberhasilan program kesehatan masyarakat yang berorientasi promotif dan preventif. World Health Organization (2023) menyatakan bahwa

Tabel 4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020–2024

Dimensi/Indi-kator Satuan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	74,23	74,25	74,51	74,81	75,03
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,16	13,18	13,2	13,21	13,23
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	9,87	10,08	10,34	10,38	10,39
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	13010	13.041	13.185	13.663	14.294

Sumber: (BPS Cilegon, 2024)

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

peningkatan harapan hidup berkaitan erat dengan keberhasilan sistem kesehatan primer dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

Pada dimensi pengetahuan, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami peningkatan yang relatif stagnan dari 13,16 tahun menjadi 13,23 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan lebih signifikan, dari 9,87 tahun pada 2020 menjadi 10,39 tahun pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ekspektasi pendidikan ke depan tidak mengalami lonjakan, tingkat partisipasi pendidikan saat ini semakin membaik. Meilinna et al. (2023) mencatat bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja.

Dimensi standar hidup layak juga menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat dari 13.010 ribu rupiah menjadi 14.294 ribu rupiah dalam kurun waktu lima tahun. Peningkatan ini mengindikasikan membaiknya daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi rumah tangga di Kota Cilegon. Ambya (2020) menjelaskan bahwa pengeluaran riil per kapita sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi lokal, pengendalian inflasi, serta efektivitas kebijakan perlindungan sosial.

Secara keseluruhan, tren data ini menunjukkan arah pembangunan manusia di Kota Cilegon yang positif dan stabil. Namun, peningkatan HLS yang stagnan mengindikasikan perlunya perhatian lebih pada perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi, terutama bagi kelompok rentan.

Darmawan Sudagung et al. (2019) menekankan bahwa stagnasi pada indikator ini dapat menjadi penghambat dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan SDM di Kota Cilegon perlu diarahkan tidak hanya pada aspek kesehatan dan ekonomi, tetapi juga pada penguatan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Analisis Komponen Penyusun IPM: Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren positif yang ditopang oleh pertumbuhan di seluruh dimensi penyusunnya: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Secara khusus, peningkatan IPM tahun 2024 dipengaruhi oleh lonjakan pengeluaran riil per kapita sebesar 4,62% serta kenaikan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,15%, menunjukkan kontribusi besar dari dimensi ekonomi dan pendidikan. Dimensi kesehatan yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH) juga mengalami peningkatan, meskipun pertumbuhannya sedikit melambat dari 0,40% pada tahun 2023 menjadi 0,29% pada tahun 2024 (BPS Cilegon (2024),

Dalam dimensi pengetahuan, indikator HLS dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami kenaikan konsisten setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan HLS selama 2020–2024 mencapai 0,41% per tahun, sementara RLS tumbuh lebih tinggi, yakni 0,95% per tahun. Meski demikian, laju pertumbuhan RLS pada 2024 hanya mencapai 0,10%, lebih rendah dibanding

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

rata-rata tiga tahun sebelumnya yang mencapai 1,70%. Berdasarkan standar nasional dan tujuan pembangunan jangka panjang seperti SDGs dan RPJMN, capaian HLS sebesar 13,23 tahun dan RLS sebesar 10,39 tahun dianggap cukup baik, namun belum ideal untuk mendorong partisipasi pendidikan tinggi secara optimal serta menekan angka putus sekolah tingkat menengah atas (BPS RI, 2025; UNDP, 2022).

Pada dimensi standar hidup layak, indikator pengeluaran riil per kapita menunjukkan perbaikan signifikan dari Rp13,663 juta pada 2023 menjadi Rp14,294 juta pada 2024, atau tumbuh 4,62%. Pertumbuhan ini jauh melampaui rata-rata tahun 2020–2023 yang hanya sebesar 1,66% per tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat, yang dapat berdampak positif terhadap akses pendidikan dan kesehatan secara tidak langsung. Menurut Yudhiana et al. (2023), pertumbuhan dimensi ekonomi IPM sangat dipengaruhi oleh stabilitas fiskal daerah, efektivitas kebijakan perlindungan sosial, serta akses terhadap lapangan kerja formal (Yudhiana et al., 2023).

Capaian IPM Kota Cilegon juga sejalan dengan target makro pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021–2026. Indeks pendidikan mendukung Misi II RPJMD yaitu “Mewujudkan pendidikan yang berkualitas”, indeks kesehatan mendukung Misi III “Meningkatkan pelayanan kesehatan”, dan indeks kesejahteraan menjadi indikator utama Misi IV “Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat” (Bappedalitbang Cilegon, 2025).

Dengan demikian, pembangunan manusia di Kota Cilegon menunjukkan arah yang progresif, namun tetap membutuhkan perhatian terhadap kualitas pendidikan tinggi dan pemerataan pelayanan kesehatan agar target pembangunan jangka panjang dapat tercapai secara inklusif dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian IPM Kota Cilegon

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, yang masing-masing tercermin dalam indikator Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta pengeluaran riil per kapita. Data menunjukkan bahwa peningkatan IPM selama periode 2020–2024 sebagian besar ditopang oleh peningkatan pengeluaran riil per kapita yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi lokal. Kenaikan signifikan sebesar 4,62% pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang kemungkinan besar didorong oleh sektor industri yang menjadi kekuatan utama Kota Cilegon sebagai kota industri di Banten. Hal ini sejalan dengan temuan Darmawan Sudagung et al. (2019) yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi lokal memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas hidup, terutama jika diikuti dengan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Faktor pendidikan juga memegang peran penting, di mana HLS dan RLS terus menunjukkan tren peningkatan, meskipun pada tahun 2024 pertumbuhan RLS sedikit melambat. RLS yang mencapai 10,39 tahun

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk dewasa telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah. Namun, HLS yang stagnan menandakan adanya tantangan dalam mendorong partisipasi ke jenjang pendidikan tinggi. (Rahminawati, 2023) menyatakan bahwa peningkatan RLS lebih cepat tercapai dengan perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, sedangkan peningkatan HLS memerlukan intervensi kebijakan yang mendorong transisi ke pendidikan tinggi dan mengurangi angka putus sekolah (Wulandari et al., 2018).

Di sisi lain, dimensi kesehatan yang direpresentasikan oleh UHH juga menunjukkan tren positif. Kenaikan UHH dari 74,23 tahun pada 2020 menjadi 75,03 tahun pada 2024 menandakan perbaikan kualitas layanan kesehatan, sanitasi, dan kesadaran masyarakat terhadap hidup sehat. Namun, pertumbuhan UHH pada 2024 (0,29%) sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun layanan kesehatan sudah tersedia, tantangan seperti penyakit tidak menular, akses pelayanan berkualitas, dan ketimpangan layanan di tingkat lokal masih harus diatasi. WHO (2023) menekankan bahwa peningkatan usia harapan hidup di wilayah urban sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan layanan kesehatan preventif dan promotif serta kualitas lingkungan tempat tinggal (WHO, 2023).

Dengan demikian, faktor-faktor yang memengaruhi IPM di Kota Cilegon bersifat multidimensional, di mana interaksi antara kondisi ekonomi, kualitas pendidikan, dan sistem layanan kesehatan yang inklusif sangat menentukan keberhasilan pembangunan manusia. Dukungan kebijakan yang terintegrasi melalui RPJMD Kota Cilegon 2021–2026 semakin memperkuat arah pembangunan, dengan misi-misi yang secara langsung mengaitkan IPM dengan target pembangunan daerah (Bappedalitbang Cilegon, 2025).

Berdasarkan data perkembangan IPM Kota Cilegon tahun 2020–2024, komponen Standar Hidup Layak, yang diukur melalui pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan), merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan signifikan pada tahun 2024 sebesar 4,62%, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan tahunan sebelumnya yang hanya sekitar 1,66%. Peningkatan ini mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat dan perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga, yang secara langsung meningkatkan skor IPM secara keseluruhan. Komponen ekonomi ini menjadi sangat dominan karena memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan menentukan kemampuan mereka dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.

Penelitian oleh (Mauludin & Dewi, 2020) menegaskan bahwa dimensi ekonomi, terutama pengeluaran riil per kapita, merupakan penggerak utama dalam peningkatan IPM di wilayah perkotaan dan industri, seperti Kota Cilegon. Hal ini dikarenakan dimensi ekonomi memiliki daya ungkit terhadap dua dimensi lainnya: pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan rumah tangga untuk menyekolahkan anak lebih lama dan

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

mengakses layanan kesehatan yang lebih baik, sehingga mempercepat peningkatan indikator pendidikan dan kesehatan. Selain itu, BPS RI (2024) dalam laporan IPM Nasional juga menunjukkan bahwa kontribusi indeks pengeluaran terhadap IPM lebih besar dibandingkan indeks pendidikan dan kesehatan, terutama di kota-kota dengan struktur ekonomi industri dan jasa.

Dengan kata lain, meskipun pendidikan dan kesehatan tetap penting sebagai fondasi pembangunan manusia, komponen ekonomi berperan sebagai pendorong utama dalam mempercepat peningkatan IPM. Di Kota Cilegon, yang merupakan pusat industri berat dan kawasan strategis nasional, pertumbuhan sektor ekonomi lokal memberikan dampak yang lebih langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan dimensi ekonomi melalui pemerataan peluang kerja, peningkatan produktivitas, dan perlindungan sosial menjadi kunci dalam strategi peningkatan IPM secara berkelanjutan.

Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan penting dalam berbagai urusan di bidang kesehatan yang mencakup pelayanan, sumber daya manusia, pengawasan farmasi dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam aspek upaya kesehatan, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) serta rujukan di tingkat kabupaten/kota, termasuk penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas layanan kesehatan lainnya. Di bidang SDM kesehatan, kewenangan meliputi penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan serta perencanaan dan pengembangan tenaga kesehatan untuk mendukung UKP dan UKM. Selanjutnya, pada urusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan-minuman, kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin apotek, toko obat, alat kesehatan, optikal, serta usaha mikro obat tradisional (UMOT).

Pemerintah daerah juga menerbitkan sertifikat produksi alat kesehatan dan produk rumah tangga tertentu, serta izin produksi dan pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga. Terakhir, dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah kabupaten/kota menjalankan peran dalam menggerakkan tokoh masyarakat, kelompok sosial, organisasi swadaya masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan kesehatan secara partisipatif di tingkat lokal.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam pembagian urusan pemerintah menunjukkan peran strategis daerah dalam mendukung pencapaian dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam aspek upaya kesehatan, kewenangan pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) serta layanan rujukan tingkat kabupaten/kota menjadi landasan penting dalam meningkatkan umur harapan hidup. Selain itu, penerbitan izin fasilitas kesehatan seperti rumah sakit kelas C dan D memungkinkan daerah memperluas akses layanan kesehatan dasar yang berkualitas. Akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan terbukti berkorelasi langsung

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

dengan peningkatan indikator kesehatan dalam IPM (BPS RI, 2024; UNDP, 2022).

Kaitan lainnya adalah dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, yang mencakup penerbitan izin praktik tenaga kesehatan serta perencanaan dan pengembangan tenaga kesehatan lokal. Pemerintah kabupaten/kota memiliki peran krusial dalam memastikan kecukupan dan distribusi tenaga kesehatan, terutama di wilayah terpencil atau kurang terlayani. Menurut Kementerian Kesehatan (2023), ketersediaan tenaga kesehatan yang merata sangat penting untuk meningkatkan cakupan layanan preventif dan kuratif, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan umur panjang dan hidup sehat, salah satu pilar utama IPM. Tanpa SDM yang memadai, akses terhadap layanan kesehatan akan terbatas dan menghambat pencapaian target IPM daerah.

Pada aspek pengawasan dan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan-minuman, kewenangan kabupaten/kota dalam menerbitkan izin dan mengawasi produk industri rumah tangga berkontribusi terhadap jaminan mutu kesehatan masyarakat. Ketahanan pangan rumah tangga dan keamanan produk kesehatan sangat mempengaruhi status gizi dan kesehatan masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada indikator umur harapan hidup dan produktivitas ekonomi. Penelitian Fatmawati et al. (2022) menunjukkan bahwa pengawasan pasca pasar yang efektif di tingkat lokal dapat mencegah peredaran produk berisiko, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Terakhir, dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, peran kabupaten/kota menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif dan partisipasi warga untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Strategi pemberdayaan melalui tokoh masyarakat, organisasi swadaya, dan dunia usaha merupakan pendekatan berbasis komunitas yang efektif dalam mendukung program preventif dan promotif. (Firdaus et al., 2024) menekankan bahwa pendekatan kultural dan partisipatif dari masyarakat lokal mampu mempercepat pencapaian indikator kesehatan dan pendidikan secara simultan, yang berdampak pada peningkatan IPM secara inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan kesehatan tidak hanya sebatas aspek administratif, tetapi memiliki peran penting dan langsung dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pencapaian indikator-indikator IPM. Integrasi antara tata kelola layanan kesehatan, penguatan SDM, pengawasan mutu, dan pemberdayaan masyarakat menjadi strategi kunci bagi daerah untuk mengakselerasi peningkatan IPM secara menyeluruh.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan dan sosial di tingkat kabupaten/kota, terlihat bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dua dimensi utama: pendidikan dan standar hidup layak. Dalam urusan manajemen pendidikan, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan dasar serta pendidikan anak usia dini (PAUD) dan

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

pendidikan nonformal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang menjadi komponen kunci dalam perhitungan IPM. Menurut (Jalal, 2021), peningkatan partisipasi anak usia dini dan peningkatan kualitas pendidikan dasar memiliki efek jangka panjang dalam menaikkan IPM secara berkelanjutan, terutama di daerah yang menghadapi kesenjangan pendidikan.

Pemerintah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan dalam menetapkan kurikulum muatan lokal, yang dapat memperkuat identitas budaya lokal sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem pendidikan. Meskipun tidak memiliki kewenangan dalam akreditasi, daerah tetap memainkan peran penting dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya dalam hal pemindahan dan distribusi guru, yang berdampak langsung terhadap mutu pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan. Selain itu, kewenangan dalam perizinan pendidikan memberi peluang bagi daerah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan, dengan tetap memastikan aspek legalitas dan kualitasnya.

Di luar pendidikan, pemerintah kabupaten/kota juga berperan besar dalam pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial, yang mendukung dimensi standar hidup layak dalam IPM. Urusan seperti pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pengelolaan data fakir miskin, pemeliharaan anak terlantar, dan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) menjadi bagian dari upaya perlindungan sosial berbasis lokal. Menurut Bappenas (2023), intervensi sosial berbasis komunitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat memperkuat jaringan perlindungan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, yang pada akhirnya mendongkrak nilai IPM daerah.

Dengan demikian, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan dan sosial memberikan fondasi penting bagi percepatan pencapaian IPM melalui dua jalur utama: peningkatan kualitas dan akses pendidikan serta penguatan jaring pengaman sosial. Untuk itu, penguatan kapasitas kelembagaan daerah, sinergi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar seluruh kewenangan ini mampu dijalankan secara efektif dan berdampak nyata terhadap pembangunan manusia di tingkat lokal.

Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota di bidang pendidikan dan sosial, pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada dimensi pendidikan dan standar hidup layak. Pada urusan manajemen pendidikan, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pendidikan nonformal. Peran ini sangat

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

penting karena pendidikan dasar dan PAUD merupakan fondasi peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dua indikator utama dalam dimensi pendidikan IPM. Penelitian oleh (Jalal, 2021) menunjukkan bahwa penguatan akses dan mutu pendidikan dasar berkontribusi signifikan terhadap peningkatan IPM daerah, khususnya di wilayah dengan kesenjangan pendidikan yang masih tinggi.

Selain pengelolaan pendidikan, kewenangan kabupaten/kota dalam penetapan kurikulum muatan lokal memberi peluang untuk menghadirkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial dan budaya lokal. Ini penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna serta mendukung pelestarian bahasa dan sastra lokal, sebagaimana tercermin dalam urusan pembinaan bahasa dan sastra. Sementara itu, dalam aspek pendidik dan tenaga kependidikan, kewenangan daerah untuk memindahkan dan menata distribusi guru turut berdampak pada pemerataan mutu pendidikan. Pemerintah kabupaten/kota juga memiliki wewenang menerbitkan izin bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, mendorong tumbuhnya peran serta publik dalam pemajuan pendidikan lokal.

Di luar pendidikan, pemerintah kabupaten/kota juga bertanggung jawab atas berbagai urusan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial, yang berkaitan langsung dengan peningkatan dimensi standar hidup layak dalam IPM. Ini mencakup pemeliharaan anak terlantar, pengumpulan data fakir miskin, pengembangan potensi kesejahteraan sosial, dan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3). Menurut Bappenas (2023), pemutakhiran data fakir miskin dan integrasi program sosial berbasis komunitas sangat efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. Pendekatan pemberdayaan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) juga menjadi bagian dari strategi inklusif dalam membangun keadilan sosial di tingkat lokal.

Dengan demikian, kewenangan kabupaten/kota dalam bidang pendidikan dan sosial bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen strategis dalam mendorong akselerasi pembangunan manusia. Dengan penguatan tata kelola daerah, sinergi antar sektor, serta pelibatan masyarakat sipil, pemerintah daerah dapat memainkan peran signifikan dalam pencapaian target IPM secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang luas dalam bidang koperasi, UMKM, penanaman modal, perdagangan, industri, dan ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar urusan tersebut, memiliki peran strategis dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada aspek pendapatan atau standar hidup layak. Salah satu instrumen penting yang dimiliki daerah adalah pemberian izin usaha simpan pinjam koperasi serta pengawasan dan penilaian kesehatannya.

Melalui kewenangan ini, pemerintah daerah dapat memperkuat sektor keuangan mikro yang inklusif, mendekatkan akses permodalan, dan mendorong kemandirian

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

ekonomi masyarakat. Menurut (Ghafur & Rahman, 2024) koperasi yang sehat dan diawasi secara efektif mampu meningkatkan kapasitas ekonomi anggota sekaligus menekan kesenjangan sosial di tingkat lokal.

Selain koperasi, kewenangan daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM—seperti pendataan, pelatihan, kemitraan, dan kemudahan perizinan—berkontribusi langsung pada penguatan ekonomi rakyat. Peningkatan skala UMKM menjadi usaha kecil menengah (UKM) akan berdampak pada naiknya pendapatan per kapita daerah dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Hal ini sangat penting untuk menaikkan komponen pengeluaran riil per kapita, salah satu indikator dalam penghitungan IPM. Menurut laporan Bank Dunia (2023), kebijakan daerah yang pro-UMKM, terutama yang mengintegrasikan dukungan teknis dan akses pasar, terbukti meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang.

Dalam hal penanaman modal, kewenangan kabupaten/kota mencakup pemberian insentif, penyusunan peta potensi investasi, promosi, hingga pelayanan izin satu pintu. Langkah ini sangat penting untuk menarik investasi masuk yang dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal. Peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif telah terbukti menjadi faktor penentu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan industri lokal (OECD, 2022).

Urusan lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan perdagangan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, termasuk pembangunan pasar rakyat dan operasi pasar. Ini memberikan jaminan atas keterjangkauan harga pangan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat miskin. Selain itu, perizinan industri, pengembangan ekspor, dan pengawasan perlindungan konsumen turut mendukung ekosistem industri dan perdagangan yang sehat dan aman di tingkat lokal. Dengan demikian, berbagai kewenangan ini merupakan bagian dari strategi daerah dalam membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang mendukung capaian IPM.

Tidak kalah penting, kewenangan di sektor ketenagakerjaan seperti pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, penyediaan informasi pasar kerja, dan perlindungan tenaga kerja migran sangat mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi dan konsultansi produktivitas dapat meningkatkan pendapatan individu dan menurunkan angka pengangguran. Seperti ditulis oleh Kusumawardhani (2022), daerah yang mampu memanfaatkan kewenangan pelatihan kerja dengan pendekatan kolaboratif dengan dunia usaha cenderung mencatat peningkatan signifikan dalam produktivitas tenaga kerja dan penyerapan kerja.

Secara keseluruhan, kewenangan daerah dalam urusan ekonomi, perdagangan, industri, dan ketenagakerjaan membentuk pilar penting dalam upaya peningkatan IPM, terutama dari sisi ekonomi. Keberhasilan pelaksanaannya memerlukan tata kelola yang adaptif, digitalisasi layanan, dan kolaborasi lintas aktor agar manfaat

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

ekonomi dapat dirasakan secara luas dan merata di masyarakat.

Strategi Peningkatan IPM Berbasis Hasil Analisis SWOT

Hasil identifikasi tersebut kemudian dianalisis secara lebih lanjut untuk menentukan faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, maupun tantangan. Kemudian setiap faktor dihitung rataratanya.

Analisis SWOT berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal dalam meningkatkan IPM Kota Cilegon dapat dilihat pada Tabel 5.

Analisis SWOT terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon, mengungkap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang saling terkait dan perlu dikelola dengan baik. Dari sisi Strengths, tren IPM Kota Cilegon menunjukkan peningkatan konsisten dari 77,11 (2021) menjadi 78,83 (2024), mencerminkan efektivitas peran pemerintah daerah dalam pembangunan manusia. Tingginya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 10,39 tahun menunjukkan keberhasilan dalam mendorong penyelesaian pendidikan menengah. Selain itu, pengeluaran riil per kapita yang mencapai Rp14,29 juta memperlihatkan daya beli masyarakat yang baik, sejalan dengan indikator standar hidup layak dalam IPM (BPS Cilegon, 2024). Kota ini juga memiliki keunggulan sebagai kota industri dengan keterlibatan sektor swasta dalam CSR, pelatihan kerja, dan beasiswa pendidikan.

Namun demikian, *Weaknesses* masih perlu mendapat perhatian serius. Harapan Lama Sekolah (HLS) masih berada pada angka 13,23 tahun, mengindikasikan rendahnya partisipasi ke jenjang pendidikan tinggi. RLS yang belum mencapai 12 tahun menunjukkan masih adanya kasus putus sekolah di tingkat SMA. Ketimpangan akses dan kualitas layanan publik antara wilayah pusat dan pinggiran kota menjadi tantangan lain, serta belum optimalnya peran industri dalam mendukung pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan lokal. Kajian oleh Fitriani et al. (2023) menunjukkan bahwa disparitas wilayah dan rendahnya partisipasi pendidikan tinggi dari kelompok menengah bawah

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

menjadi penghambat peningkatan IPM secara merata.

Tabel 5
Analisis SWOT berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal dalam meningkatkan IPM Kota Cilegon

Strengths	Weaknesses
1. Peran Pemerintah Tren IPM meningkat konsisten setiap tahun sejak 2021 (dari 77,11 ke 78,83). 2. RLS tinggi (10,39 tahun) mencerminkan banyak warga menyelesaikan pendidikan menengah. 3. Pengeluaran riil per kapita tinggi (Rp 14,29 juta), mencerminkan daya beli dan standar hidup layak. 4. Fasilitas kesehatan dan pendidikan cukup merata di wilayah urban. 5. Kota industri dengan dukungan swasta (CSR, pelatihan, beasiswa).	1. HLS masih rendah (13,23 tahun): belum mencapai jenjang sarjana. 2. RLS belum mencapai 12 tahun (SMA tuntas): indikasi putus sekolah tingkat SMA masih ada. 3. Ketimpangan antarwilayah dalam akses dan kualitas layanan publik (pinggiran vs pusat kota). 4. Belum optimalnya keterlibatan aktif sektor industri dalam pendidikan vokasi berbasis kebutuhan tenaga kerja lokal. 5. Masih terbatasnya partisipasi pendidikan tinggi, khususnya dari kelompok masyarakat menengah bawah.
Opportunities	**Threats**
1. Bonus demografi: dominasi usia produktif dapat menjadi penggerak akselerasi ekonomi dan pendidikan. 2. Kemitraan strategis dengan sektor industri besar di Cilegon untuk pelatihan kerja dan program magang. 3. Kebijakan nasional mendukung transformasi digital, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendidikan (RPJMN 2025–2029). 4. Peluang pemanfaatan data digital (SIPD, BPS, Satu Data) untuk perencanaan pembangunan yang lebih presisi. 5. Kawasan industri yang berkembang bisa menjadi pusat inovasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.	1. Urbanisasi cepat dan kepadatan penduduk dapat membebani layanan pendidikan dan kesehatan. 2. Kesenjangan sosial ekonomi antara kawasan industri dan pemukiman sekitar berpotensi memperlebar disparitas IPM. 3. Risiko krisis ekonomi global atau fluktuasi industri berisiko pada pendapatan dan pengangguran. 4. Isu lingkungan dan kesehatan masyarakat akibat polusi dari industri bisa berdampak jangka panjang pada umur harapan hidup. 5. Ketergantungan terhadap sektor industri besar bisa menjadi kelemahan jika tidak diimbangi dengan diversifikasi ekonomi.

Dari sisi *Opportunities*, Cilegon sedang memasuki era bonus demografi, dengan dominasi penduduk usia produktif yang dapat menjadi katalisator peningkatan IPM jika diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kemitraan dengan industri besar di kawasan Cilegon membuka peluang strategis untuk pelatihan kerja dan magang vokasi. Ditambah lagi, dukungan kebijakan nasional seperti RPJMN 2025–2029 yang fokus pada digitalisasi layanan publik, pemerataan pendidikan, dan pengentasan kemiskinan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program daerah. Potensi pemanfaatan sistem data digital seperti SIPD dan Satu Data juga memungkinkan perencanaan pembangunan berbasis bukti dan lebih presisi (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Namun, *Threats* yang muncul juga tidak dapat diabaikan. Urbanisasi cepat dan meningkatnya kepadatan penduduk memberi tekanan pada layanan pendidikan dan kesehatan. Kesenjangan sosial antara kawasan industri dan pemukiman warga sekitar dapat memperlebar disparitas IPM. Selain itu, risiko

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

krisis ekonomi global dan dampak fluktuasi sektor industri berpotensi meningkatkan pengangguran dan menurunkan daya beli. Aspek lingkungan juga menjadi ancaman nyata, karena polusi industri dapat berdampak negatif terhadap Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat. Ketergantungan berlebihan pada sektor industri besar tanpa diversifikasi ekonomi juga menjadi risiko struktural jangka panjang (Hasanah & Wibowo, 2022).

Secara keseluruhan, analisis SWOT ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan IPM di Kota Cilegon memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kekuatan dan peluang secara strategis untuk mengatasi kelemahan struktural dan mengantisipasi berbagai ancaman eksternal. Kebijakan yang mendukung pendidikan vokasi, beasiswa untuk kelompok rentan, penguatan data spasial untuk intervensi wilayah, serta inovasi layanan digital di sektor pendidikan dan kesehatan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong IPM ke tingkat yang lebih tinggi secara berkelanjutan.

Alternatif strategi peningkatan IPM Kota Cilegon ditunjukkan oleh tabel 6. Dari keempat kelompok strategi yang diusulkan,

Tabel 6
Alternatif strategi peningkatan IPM
Kota Cilegon (Matriks SWOT)

Strategi SO	Strategi WO
1. memperluas beasiswa pendidikan tinggi untuk keluarga miskin dan buruh industri. 2. Kemitraan industri-pendidikan: integrasikan magang, pelatihan kerja, dan sekolah vokasi di bawah CSR industri baja, kimia, pelabuhan. 3. Digitalisasi pendidikan dan kesehatan: pengembangan platform daring, layanan e-puskesmas, dan literasi digital untuk keluarga 4. Pusat Inovasi Kota Industri: dorong Cilegon sebagai pusat pelatihan dan inovasi vokasi di Banten	1. Program Wajib Belajar 13+ Tahun: peningkatan kapasitas SMA dan penguatan pendidikan kesetaraan. 2. Revitalisasi Pendidikan Tinggi Lokal: kerja sama dengan perguruan tinggi swasta untuk kelas malam/karyawan. 3. Pemetaan dan intervensi wilayah tertinggal: gunakan data IPM per kelurahan untuk penyusunan program berbasis wilayah (mis. edukasi, pelatihan, bantuan sosial). 4. Program Tutor Sebaya & Relawan Edukasi: dorong pelibatan pemuda dalam gerakan literasi dan penguatan kompetensi.
Strategi ST	**Strategi WT**
1. Kebijakan proteksi sosial berbasis komunitas: jaring pengaman sosial bagi keluarga terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) industri. 2. Green IPM Program: integrasi indikator kualitas lingkungan (polusi udara/air) dalam perencanaan kesehatan masyarakat. 3. Diversifikasi ekonomi lokal: kembangkan sektor UMKM, perdagangan, dan ekonomi kreatif agar tidak hanya bergantung pada industri besar.	1. Paket Intervensi Komprehensif Kelurahan: gabungkan layanan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja secara terpadu di kelurahan dengan IPM rendah. 2. Kewajiban kontribusi CSR berbasis IPM: industri besar diwajibkan menyasar program peningkatan RLS dan HLS melalui dana CSR. 3. Monitoring berbasis Satu Data: pastikan data IPM, pendidikan, dan kemiskinan dikelola terpadu untuk evaluasi kebijakan per tahun.

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

strategi WO (Weakness–Opportunities) dinilai sebagai pilihan paling memungkinkan untuk diterapkan dalam jangka pendek hingga menengah. Strategi ini secara langsung merespons berbagai kelemahan internal, seperti rendahnya akses pendidikan di wilayah tertentu dan ketimpangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar-kelurahan, dengan memanfaatkan peluang eksternal yang tersedia, seperti kerja sama dengan perguruan tinggi, pemanfaatan program CSR industri, serta pelibatan generasi muda dalam pembangunan sosial.

Program seperti Wajib Belajar 13 Tahun, Revitalisasi Pendidikan Tinggi Lokal, serta Pemetaan dan Intervensi Wilayah Tertinggal berbasis data IPM, memungkinkan implementasi yang efektif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) tanpa memerlukan investasi besar. Studi oleh Nasution & Lubis (2021) menegaskan bahwa strategi pendidikan berbasis komunitas lokal dan intervensi spasial berbasis data wilayah terbukti meningkatkan efektivitas kebijakan sosial. Selain itu, keterlibatan pemuda dalam program Tutor Sebaya dan Relawan Edukasi sejalan dengan temuan Putri et al. (2020), yang menunjukkan bahwa pelibatan pemuda dalam literasi digital dan penguatan kompetensi berkontribusi terhadap percepatan pembangunan manusia di daerah. Dengan mengintegrasikan pendekatan tersebut, strategi WO menjadi pilihan yang realistis, adaptif, dan berdampak tinggi dalam mendorong peningkatan IPM secara inklusif dan partisipatif di Kota Cilegon

Tabel 7
Matrlks Logika Kebijakan (*Input–Output–Outcome*)

Kebijakan	Input	Output	Outcome
Cilegon cerdas 2030	Anggaran beasiswa, kemitraan PT, fasilitas belajar	Siswa tertampung, kelurahan memiliki pusat belajar	HLS & RLS meningkat signifikan
Kota sehat & produktif	Posyandu aktif, kader kesehatan, pelatihan kerja	Penurunan stunting, peningkatan skill & kewirausahaan	UHH & daya beli meningkat
Zona intervensi IPM kelurahan	Data IPM kelurahan, dukungan lintas OPD & CSR	Intervensi terintegrasi berbasis kelurahan	Pemerataan IPM antarwilayah tercapai

Selaian pilihan strategi analisis SWOT yang dipilih, alternatif kebijakan yang bisa diambil dalam meningkatkan IPM Kota Cilegon Tahun 2025-2030 berdasarkan matriks logika kebijakan tabel 7 adalah sebagai berikut:

Alternatif Kebijakan Cilegon Cerdas 2030

Alternatif Kebijakan ini berfokus pada Peningkatan akses dan mutu Pendidikan untuk peningkatan HLS meningkat ke 14,5 tahun; dan RLS meningkat diatas 11,5 tahun.

Kebijakan ini mencakup beberapa elemen penting yaitu, (1) Beasiswa wajib

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

belajar 13 tahun untuk siswa miskin dan rentan, (2) Pendidikan kesetaraan (Paket C) dan kelas malam bagi pekerja. (3) Kemitraan dengan perguruan tinggi swasta untuk membuka kelas terapan; dan (4) Digitalisasi pembelajaran dan pusat belajar komunitas.

Alternatif Kebijakan Kota Sehat Dan Produktif

Alternatif Kebijakan ini berfokus pada Perbaikan kesehatan dan daya beli masyarakat untuk peningkatan UHH > 76 tahun; dan pengeluaran riil per kapita > Rp 16 juta.

Kebijakan ini mencakup beberapa elemen penting yaitu, (1) Layanan kesehatan promotif: Posyandu remaja, edukasi PHBS, skrining penyakit tidak menular, (2) Program Gizi Keluarga untuk menurunkan stunting., (3) Pelatihan kerja pendek untuk pemuda dan perempuan, dan (4) Revitalisasi UMKM lokal dan dukungan ekonomi rumah tangga.

Alternatif Kebijakan Zona Intervensi IPM Kelurahan

Alternatif Kebijakan ini berfokus pada Pemerataan pembangunan berbasis wilayah untuk menurunkan Disparitas IPM antarwilayah < 5 poin; dan penguatan data Satu Data.

Kebijakan ini mencakup beberapa elemen penting yaitu, (1) Pemetaan spasial indikator IPM per kelurahan, (2) Paket intervensi kelurahan: pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, (3) Kemitraan CSR berbasis zona merah IPM, DAN (4) Sistem insentif dan monitoring kelurahan berbasis IPM. Logika Kebijakan ditungkan dalam matriks berikut:

Dalam kerangka kerja implementasi selama lima tahun, perlu dibuat rencana aksi untuk meningkatkan semua komponen penyusun IPM secara seimbang (pendidikan, kesehatan, daya beli), serta membentuk ekosistem pembangunan SDM jangka panjang berbasis wilayah, inklusif, dan berbasis kolaborasi. Rencana Aksi sebagaimana dimaksud, dapat dilihat dalam lampiran 1.

Rencana aksi ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk Meningkatkan semua komponen penyusun IPM secara seimbang (pendidikan, kesehatan, daya beli) serta membentuk ekosistem pembangunan SDM jangka panjang berbasis wilayah, inklusif, dan berbasis kolaborasi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon pada tahun 2024 sebesar 78,83 menempatkannya pada kategori “tinggi”, namun belum mencapai klasifikasi “sangat tinggi” sebagaimana diharapkan. Analisis terhadap komponen penyusun IPM menunjukkan bahwa capaian tertinggi terdapat pada dimensi standar hidup layak (pengeluaran per kapita), diikuti oleh dimensi

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

kesehatan (umur harapan hidup), sementara dimensi pendidikan masih menjadi tantangan utama, terutama pada indikator harapan lama sekolah yang belum maksimal.

Faktor-faktor yang memengaruhi capaian IPM di antaranya adalah ketimpangan akses pendidikan dan layanan kesehatan antarwilayah, rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kesehatan, serta belum optimalnya keterlibatan sektor non-pemerintah dalam mendukung pembangunan manusia.

Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang paling potensial untuk diterapkan adalah strategi WO (Weakness–Opportunities), yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas lokal dan optimalisasi peluang kerja sama dengan mitra eksternal. Strategi ini memungkinkan intervensi berbasis wilayah dan kelompok sasaran, didukung oleh data IPM per kelurahan, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan dunia usaha serta perguruan tinggi. Oleh karena itu, upaya peningkatan IPM di Kota Cilegon harus diarahkan pada sinergi lintas sektor yang terencana, terukur, dan berbasis data.

Rekomendasi

Rekomendasi strategi peningkatan IPM adalah sebagi berikut

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan; Pendidikan merupakan komponen IPM dengan capaian terendah, khususnya pada indikator harapan lama sekolah. Oleh karena itu, program wajib belajar 13 tahun, penguatan infrastruktur pendidikan, serta pelatihan vokasi berbasis industri perlu segera diimplementasikan untuk meningkatkan daya saing SDM sejak dini.
2. Melaksanakan Intervensi Berbasis Wilayah; Ketimpangan capaian IPM antar-kelurahan menunjukkan perlunya intervensi yang spesifik dan terarah. Penggunaan data IPM per kelurahan untuk menetapkan zona prioritas pembangunan memungkinkan penanganan yang lebih efisien, adil, dan sesuai kebutuhan lokal.
3. Memperkuat Kolaborasi Multi-Pihak; Peningkatan IPM tidak dapat dicapai oleh pemerintah saja. Kolaborasi dengan dunia usaha (melalui program CSR), perguruan tinggi, dan masyarakat sipil sangat penting dalam pelaksanaan program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara partisipatif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ambya, A. (2020). How Government Spending on Public Sector Affect The Economic Growth? *Jejak*, *13*(1), 218–229.https://doi.org/10.15294/jejak.v13i1.21943

Bappedalitbang Cilegon. (2025). *LKPJ Wali Kota Cilegon Tahun 2024*.

Bappenas (2024). RPJMN 2025–2029 https://bappenas.go.id](https://bappenas.go.id

BPS Kota Cilegon. (2024). *Berita Resmi*

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

Stratistik: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon Tahun 2024. https://cilegonkota.bps.go.id/pressrelease/2020/12/30/147/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kota-cilegon-pada-tahun-2020-mencapai-73-05.html

BPS Kota Cilegon. (2025). *Kota Cilegon Dalam Angka 2025* (Vol. 25). https://cilegonkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/bf9ec471a777169104e8db53/kota-cilegon-dalam-angka-2025.html

BPS RI. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia 2024* (Vol. 19, Issue 73). https://www.bps.go.id/id/publication/2025/05/15/dd9a3ce7dfae1c733e46338f/indeks-pembangunan-manusia-2024.html

Darmawan Sudagung, A., Putri, V., Evan, J., Sasiva, I., & Putri Olifiani, L. (2019). Upaya Indonesia Mencapai Target Sustainable Development Goals Bidang Pendidikan Di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. *Jurnal Polinter* , *5*(1), 1–27.

Fitriani, A., Syahputra, H., & Wijayanti, E. (2023). Ketimpangan akses pendidikan dan tantangan pembangunan manusia di wilayah urban. *Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Daerah*, 9(1), 45–60. https://doi.org/10.22219/jppa.v9i1.2023

Firdaus, Ahmad, S., Akhyar, & Haeril. (2024). Efektivitas, Stunting, Prevalensi, Kabupaten Bima. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *5*(3), 366–376.

Herdiansyah, D., & Kurniati, P. S. (2020). Pembangunan Sektor Pendidikan Sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia Di Kota *Reformasi Government Dalam Demokrasi*, *8*(1), 43–50. https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.2765

Jalal, J. S. (2021). *Strategi Peningkatan Indeks Pendidikan Sebagai Lokomotif Pendorong Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Kusumawardhani, D. (2022). Pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal. *Jurnal Manajemen Ketenagakerjaan*, 10(1), 25–37. https://doi.org/10.24832/jmk.v10i1.1407]

Mauludin, W., & Dewi, R. M. (2020). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, *8*(3), 116–121. https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p116-121

Meilinna, T. Z., Alfunnuria, V. S., Safira, Y. E., & Kholid, Moh. K. A. (2023). Pengaruh usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita terhadap IPM. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, *3*(1), 12–29. https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i1.1613

Nur, I. P. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Indonesia*, 15–31. https://core.ac.uk/download/pdf/12346579.pdf

Pemerintah Kota Cilegon. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kota Cilegon*.

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

Rahminawati, N. (2023). Strategi Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rta-Rata Lama Sekolah (RLS). *Ta'dib : Jurnal Pendidikan Islam*, *12*(2), 367–382. https://doi.org/10.29313/tjpi.v12i2.12852

Ramadanisa, N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(7), 1049–1061. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.121

Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, *1*(1), 148–163.

Sutjipto, H. (2006). Sinergitas Pembangunan Daerah dalam Meningkatkan IPM di Jawa Barat. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, *22*(4), 479–495.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development. In *Pearson* (Thirteenth, Issue 13th Edition). Pearson Education Limited. https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development

UNDP. (1990). *Human development report 1990*. https://doi.org/10.2307/2620504

UNDP. (2022). *Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives*. https://hdr.undp.org/

Wulandari, R. W., Kholik, A., Qudsiyah, M., & Agustian, R. (2018). Program Sosialisasi Pendidikan Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (Hls). *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 48. https://doi.org/10.30997/qh.v4i1.1184

World Bank. (2023). S*mall and Medium Enterprises Finance* . https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance](https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

Tabel 12
Rencana Aksi Peningkatan IPM Kota Cilegon Tahun 2025–2030

Bidang Urusan	Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Tahun
Pendidikan	Meningkatkan Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah	HLS & RLS meningkat	2025–2030	
	Meningkatkan kualitas pendidikan dasar-menengah	Nilai mutu sekolah meningkat	2025–2028	
	Meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi	Partisipasi pendidikan tinggi	2026–2030	
	• Beasiswa wajib belajar 13 tahun bagi keluarga tidak mampu • Penguatan pendidikan kesetaraan (Paket C) • Revitalisasi SMA/SMK vokasi berbasis industri			
Kesehatan	Meningkatkan umur harapan hidup (UHH)	• Penguatan layanan promotif dan preventif (Posyandu remaja & lansia) • Skrining penyakit tidak menular • Edukasi kesehatan lingkungan di kawasan industri	UHH meningkat	2025–2030
	Peningkatan kualitas layanan dasar kesehatan	• Peningkatan akreditasi Puskesmas dan Poskesdes • Digitalisasi layanan (e-puskesmas)	Akreditasi, kepuasan layanan	2025–2028
	Peningkatan kesehatan ibu dan anak	• Peningkatan cakupan imunisasi & penanganan stunting • Kampanye gizi seimbang keluarga	Penurunan stunting	2025–2027
Sosial & Pemberdayaan Masyarakat	Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan IPM	• Program bantuan pendidikan berbasis kelurahan IPM rendah • Pendampingan PKH plus untuk remaja putus sekolah	Ketimpangan IPM antar wilayah	2025–2030
	Peningkatan partisipasi warga dalam pendidikan dan pelatihan	• Program Tutor Sebaya & Relawan Edukasi berbasis RW • Mobil edukasi keliling (smart car)	Partisipasi belajar komunitas	2026–2030
	Penguatan peran perempuan dan penyandang disabilitas	• Kelas keterampilan ibu rumah tangga • Pendidikan inklusif berbasis komunitas	Indeks Gender (IPG)	2025–2029

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 86–110
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.378

Tabel 12 (lanjutan)
Rencana Aksi Peningkatan IPM Kota Cilegon Tahun 2025–2030

Bidang Urusan	Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Tahun
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemenuhan sarana pendukung layanan dasar	• Pembangunan ruang kelas baru & rehab sekolah • Peningkatan akses air bersih dan sanitasi di lingkungan sekolah & puskesmas	Jumlah fasilitas tersedia	2025–2028
	Pemerataan infrastruktur wilayah IPM rendah	• Intervensi infrastruktur kelurahan zona merah IPM • Akses jalan dan transportasi ke sekolah & layanan kesehatan	Indeks kemudahan akses	2026–2029
Tenaga Kerja & Ekonomi	Peningkatan keterampilan angkatan kerja muda	• Pelatihan vokasi berbasis permintaan industri (dual-track) • Sertifikasi kompetensi pemuda lulusan SMA/SMK	Jumlah lulusan bersertifikat	2025–2030
	Perluasan peluang kerja produktif	• Inkubasi UMKM milenial & IRT • Koperasi pelajar dan pelatihan kewirausahaan sekolah	Tingkat partisipasi kerja	2026–2030
	Integrasi CSR sektor industri untuk IPM	• Regulasi dan MoU kemitraan CSR fokus pada peningkatan pendidikan dan kesehatan	Jumlah program CSR IPM	2025–2030
Perencanaan & Statistik (Pendukung Teknis)	Perencanaan pembangunan berbasis data	• Integrasi data IPM per kelurahan ke dalam SIPD • Monitoring evaluasi tahunan target IPM 2030	Dashboard IPM aktif	2025–2030
	Pemetaan wilayah intervensi prioritas	• Penilaian spasial indikator IPM (HLS, RLS, UHH) tiap tahun • Penerapan Satu Data Cilegon	Wilayah prioritas terpetakan	2025–2027